

Pimpinan : Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berhadir diruangan ini, shalawat serta salam tak hentinya kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah.

Yang kami hormati Pimpinan serta Anggota Badan Legislasi DPRK Aceh Barat Daya, yang kami hormati Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat Daya serta seluruh peserta rapat yang sudah berhadir pada hari ini. Sesuai dengan surat yang sampai kekami dimana Pemerintah mengajukan dua Rancangan Qanun pertama tentang Perangkat Kabupaten dan Rencana Induk Pariwisata. Dari kami perlu gambaran sedikit terkait dengan perangkat ini, karena ada dua SKPK penambahan, jadi pertimbangannya sampaikan kepada kami karena satu sisi kita melakukan efesiensi, namun disisi lain sudah dihitung penambahan dinas ini bertambahnya anggarannya misalnya mobil kepala dinas, tunjangan dan lainnya. Jadi kepada bapak gambarkan dulu kepada kita, apalagi terkait dengan Badan Dayah, tapi kalau Pemuda dan Olah Raga ada kolerasinya dengan pusat sehingga ada anggaran yang masuk. Jadi mohon penjelasannya.

Kabag Hukum Setdakab : Ass

Bahwasanya secara garis besar kenapa muncul karena pertimbangannya adalah ada beberapa kegiatan yang dulunya tidak terakomodir, dulu tunduk ke Dinas Syari'at Islam dan menjadi tidak memungkinkan koordinasi dengan Provinsi.

Kabag Organisasi : Ass

Perlu kami sampaikan bahwa tentang perangkat daerah sudah dibentuk tahun 2016 lalu yaitu Badan Dayah, kemudian pada masa Pak Akmal digabung dengan Syari'at Islam seiring berjalannya waktu Pj. Bupati Darmansyah menerima aspirasi dari Teungku untuk merubah kembali, setelah kami rubah lahir Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Pemuda dan Olah Raga, namun di Qanun itu meminta menggabungkan dua Sekretariat. Setelah Bupati baru dilantik meminta untuk digabungkan kembali Sekretariat ini yaitu jangan digabungkan dengan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga sepanjang ada nomenklaturnya jadi momen ini Bupati meminta untuk di rubah kembali.

- Pimpinan : Terkait Pemuda dan Olah Raga ini kami tidak masalah tapi Badan Dayah ini selama ini tidak masalah yang dikhawatirkan adalah beban anggarannya itu jadi mohon dipikirkan kembali.
- Kabag Organisasi : Anggarannya sudah di alokasikan sekitar 800 juta sekian dan sudah dihitung jadi tidak masalah.
- Justar. YS, S.Pd : Terkait Badan Dayah itu sangat penting karena tergantung anggaran juga terkait dengan kajiannya. Kalau dibentuk ini dapatnya ini dan kalau kita bentuk ini dapatnya ini, jadi kajiannya yang harus penting dan sudah sejauh mana jadi mohon disampaikan.
- Kabag Organisasi : Kajian secara khusus mungkin belum ada, tapi setelah kami koordinasi dengan keuangan sudah mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta.
- Justar. YS, S.Pd : Kajian itu perlu maka hati-hati dalam mengalokasikan anggaran kita sedangkan kita sekarang sudah banyak hutang dan masih belum terbayarkan, jadi kajiannya itu dulu. Kalau saya tidak sependapat dan kami sependapat dengan pimpinan bahwa kajiannya itu yang perlu dan apakah bisa menjamin kedepan itu tidak masalah. Sekarang semua di evaluasi jadi sampai disitu pertimbangannya.
- Pimpinan : Kalau dari prediksi pendapatan kita beberapa tahun ini hanya 800 milyar dan tahun 2028 nanti tidak ada lagi Otsus dan menjadi masalah lagi dan terkait dengan Pemuda dan Olah Raga tidak masalah. Makanya kami sampaikan kajian itu yang penting supaya tidak menjadi masalah. Jadi kami menginginkan di pertimbangkan dengan matang.
- Sardiman : Ass  
Langsung saja kami sampaikan menyangkut khususnya kita di Aceh ada beberapa badan dan SKPK yang beda dengan provinsi lain. Kita mempertahankan kekhususan Aceh. Menurut hemat saya tidak harus bupati definitif dari jaman 2007 sudah ada tentu mengacu pada UUPA, hari ini kami sedikit beda pendapat kalau yang diplot 800 juta menurut kami tidak terlalu signifikan, kalau PU dan Perkim itu tidak bisa hilang tapi bisa kita kurangi. Badan Dayah ini satu sisi menurut kami harus diakomodir tapi dengan kajian dan pertimbangan tidak serta merta mengkaji ketika mandek bagaimana itu jangan sekarang dikaji, tapi pertanyaan kami ini sudah pernah jalan dan kita hanya menjalankan.

Masa Jufri sudah ada pada masa Akmal di gabungkan. Kami dulu pernah di Desa dan sangat amburadul terkait dengan gaji teungku-teungku. Menyangkut anggaran tadi ASN saja kalau tidak ada anggaran pasti di cuitkan dari Dinas lain. Kita mempertahankan kekhususan kita di Aceh jadi mohon pertimbangan kembali dan ada solusi yang baik.

- Pimpinan : Jadi ini dilema bagi kita, kami sepakat bahwa kadang-kadang kita selalu berbicara lekspesialis. Contoh kita berbicara MAA sampai ada yang tidak digaji, kemudian MPD juga sama. Kita tidak menolak tapi dipikirkan ketika dibentuk tapi tidak hanya sebagai pajangan nama saja.
- Sardiman : Mungkin dulu kepemimpinan dari MAA asal pilih saja. Kami bisa menjamin juga terkait dengan Pariwisata dulu juga ada. Sekarang kalau kita tunjuk ke luar dimana pariwisata juga tidak ada, memang ada bantuan dari pusat tapi cukup dengan gaji. Kalau masalah kinerja juga kita sampaikan di DSI juga tidak ada yang di tonjolkan. Jadi itu bukan hanya semboyan kalau tidak ada fungsi bubarkan saja. Kita tidak hanya coba-coba tapi serius dalam hal ini.
- Pimpinan : Mohon pertimbangan-pertimbangan itu di ukur mulai aspek anggaran, capaian dan lainnya mohon sampaikan secara rinci.
- Kabag Organisasi : Catatan tadi sudah kami catatan dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Dinas Syari'at Islam sekarang bergabung dengan Badan Dayah, jika di pisahkan anggarannya akan diambil dari Dinas Syari'at Islam sekarang artinya tidak ada penambahan anggaran. Pj. Kemarin aspirasi dari teungku-teungku meminta di jadikan kami satu dinas seperti di Kabupaten lain.
- Justar. YS, S.Pd : Kita sekarang beban yang diberikan, maka perlu kajian yang matang. Kalau memang sanggup tidak masalah tapi harus ada balance dulu itu menurut pandangan kami. Kalau memang menurut kajian itu tidak masalah kami juga tidak memungkiri.
- Sardiman : Kami hanya keberatan terhadap dengan anggarannya dulu, kami bukan hanya mendukung tapi juga harus rill. Jadi mohon dijelaskan menyangkut anggaran tadi, dengan dibentuknya dua Dinas tersebut apakah bertambah anggarannya.

- Kabag Organisasi : Yang bertambah mungkin tunjangan ppegawainya. Kalau menyangkut dengan anggaran itu tidak signifikan karena diambil dari anggaran Dinas induknya.
- Pimpinan : Tadi disampaikan kalau Badan Dayah itu banyak kendala-kendala di Provinsi. Sekarang di pisahkan apakah bertambah tidak beban kita, jangan hanya di pisahkan Dinas itu tidak ada masukkan apa-apa.
- Kabag Organisasi : Kalau untuk jaminan kami tidak bisa menjamin.
- Sardiman : Dengan tidak adanya Badan Dayah apakah berpengaruh penambahan anggaran lebih. Jika Otsus berakhir 2027 dan mudah-mudahan tidak itu menjadi masalah juga. Kami selaku wakil rakyat berharap tidak menjadi beban menyangkut anggaran. Mudah-mudahan nanti ada pariwisata apakah bisa menambah PAD untuk Daerah. Jadi ini tentu bapak-bapak menyampaikan kembali, hari ini kita diskusi untuk mencari solusi sesuai apa yang disampaikan pimpinan tidak ada kita untuk tidak menyetujui tapi harus ada kajian-kajian.
- Kabag Hukum Setdakab : Terkait kajian lembaga khusus ini untuk memudahkan koneksi dengan profinsi dengan anggaran yang lebih fokus. Selama ini dalam pengajuan anggaran selalu bentrok karena selama ini penganggarannya lebih fokus ke Syari'at Islamnya. Kalau Dayah ini adalah swasta dan jika menginginkan anggaran harus dengan proposal. Bupati menginginkan kalau kita memang khusus harus ada seperti itu.
- Sardiman : Harapan ketua Banleg ini mudah-mudahan dalam beberapa hari lagi akan di bahas lagi Qanun. Maksud kami jangan ada Qanun yang mubazir, intinya bukan hanya membuat Qanun dan kami jamin apa yang kita bahas sekarang tidak sampai ke teungku. Harapan kami setelah kita sahkan Qanun ini jangan teungku-teungku itu berpedoman pada proposal saja. Jadi kita tidak cukup di Qanun saja tapi di lapangan betul-betul maksimal. Sekarang juga sudah ada Qanun Trantibun juga kami sampaikan apakah sudah berjalan atau belum.
- Pimpinan : Kami juga agak tersinggung kalau orientasi kita mewujudkan Badan Dayah itu hanya untuk anggaran, tapi sebenarnya bagaimana pengawasan dayah itu jangan hanya poposal saja.

- Sardiman : Hari ini kalau mau jujur jumlah TPA banyak yang sudah mati teungku tidak jelas, santri juga tidak ada tapi anggaran yang peling penting.
- Rahmat Irfan : Menyimak beberapa poin-poin memang kita dalam posisi dilema, satu sisi di Badan Dayah yaitu masalah anggaran, tapi kita juga harus memikirkan juga ini amanah UUPA bahwa salah satu kekhususan aceh ini tidak terlaksana berarti satu persatu akan hilang. Kita terlalu berasumsi terkait dengan teungku dayah, memang kalau kita lihat sekarang banyak dayah yang mati suri. Tapi kalau memang ingin serius pada saat membangun dayah itu tidak asal-asalan. Begitu juga TPA hamir rata-rata kampung dua TPA tapi kita lihat muridnya sedikit. Kalau kita lihat teungku juga harus dilihat juga bagaimana membangun satu pesantren itu. Juga penguatan pendidikan dayah itu juga harus diutamakan juga karena banyak anak-anak kita lulusan dari luar negeri dan mereka tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan ilmunya. Jadi tempatkan anak-anak kita sesuai dengan ilmu dia.
- Pimpinan : Kenapa ini penting kami sampaikan karena di pasal 2 kita diminta berdasarkan efesiensi.
- Plh. Sekwan : Susunan Perangkat Kabupaten kita sekarang berapa dan usulan sekarang berapa. Dengan berlakunya ini jadi berapa SKPK kita menjadi 40. Apakah ini sudah masuk dalam pagu untuk 2 dinas ini berapa. Kita berbicara efesiensi menurut kami tidak menambah tapi yang menambah apakah kita sudah siap dimana kantornya, artinya tempatnya dulu. Selanjutnya ini kekhususan Aceh nanti ada Peraturan Bupati lebih efektifnya seperti yang dimaksudkan oleh Sardiman kalau Baitul Mal seleksinya ada di Baitul Mal tapi fit and propertesnya di DPRK, kami mengusul lembaga kekhususan ini fit and propertesnya harus ada. Kalau MPD, MPU MAA itu dipilih sepihak oleh Bupati dan pada saat pembahasan anggaran mereka minta tambah. Selanjutnya lembaga keistimewaan itu karena Aceh itu ada sedangkan di Kabupaten lain tidak ada. Intinya setelah dibentuk jangan sampai terganggu, dan penjelasan kenapa terpisah dari Dinas induk ini kenapa.
- Pimpinan : Betul juga disampaikan tadi terbentuknya Dinas ini apa hanya untuk bagi-bagi jabatan atau mempermudah proposal saja.

- Kabag Organisasi : Di perubahan ketiga Dinas Dayah itu sudah terbentuk di Qanun 2024 hanya belum operasional penuh, yang dipisahkan adalah dua sekretariat yaitu Sekretariat MAA dan Sekretariat MPD.
- Plh. Sekwan : SKPK kita sekarang adalah 38 dan akan menjadi 40 jika 2 Sekretariat yaitu MAA dan MPD berpisah.
- Sardiman : Perbedaan Dinas Syari'at Islam dan Badan Dayah, yang kami ingin tanyakan perbedaan regulasinya seperti apa?
- Pimpinan : Kita lanjut ke Rancangan Qanunnya, mohon di paparkan.
- Kabag Organisasi : Pasal 1 Memutuskan Menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.  
Pasal 2 lanjut  
Pasal 3 di Qanun ini dibentuk Perangkat Kabupaten bukan SKPK sesuai dengan UUPA.  
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Rancangan Qanun Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan gabung. Dinas Pemuda dan Olah Raga ditambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sardiman : Menyangkut SMA informasi akan dikembalikan ke Kabupaten tentu ada Rekomendasi dari DPRK.
- Pimpinan : Terkait dengan peternakan yang mengurusnya siapa? Karena di Kabupaten kita tidak ada Dinas Peternakan.
- Kabag Organisasi : Ada di bidang Dinas Pertanian.  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi.
- Pimpinan : Terkait Badan misalnya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dirubah Kabupaten menjadi Daerah.
- Kabag Organisasi : Untuk Camat bukan lagi Sekretariat Kecamatan tapi Kecamatan. Untuk Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten bukan Majelis Pendidikan Daerah.
- Tanzilurrahman : Layaknya UPTD itu ditambah satu lagi, kalau Badan Dayah itu tidak jelas tapi juga tidak masalah kalau Badan Dayah dijadikan dinas UPTD

juga sama, sehingga aset dijalankan satu pintu. Tolong sampaikan ke Bupati kami pikir ini wajib untuk membentuk Dinas yang membidangi pengelolaan Asli Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah satu Pintu.

- Sardiman : Bertentangan tidak dengan provinsi seandainya satu atap khusus UPTD bidang pendapatan. Apakah di provinsi masih sama? Jadi yang dimaksud dengan kawan-kawan kurang respon apakah termasuk aset keuangan, itu perlu penjelasan atau sejauh ini ada tidak melakukan koordinasi ke provinsi supaya lebih efektif pengelolaan pendapatan.
- Pimpinan : Memang betul seperti yang disampaikan oleh teman-teman selama ini aset kita tidak satu tempat misalnya beko di Perkim ada, di Pertanian ada, jadi itu bagaimana.
- Kabag Organisasi : Kami akan mencatat usulan dari DPRK dan akan kami sampaikan ke Pimpinan Daerah.
- Justar. YS, S.Pd : Tujuan kita untuk membangun daerah, jadi jangan hanya menjadi catatan saja.
- Pimpinan : Soal aset itu bukan kami saja tapi semua dewan menjadi pembicaraan serius, terutama kedepan dana otsus kita mungkin tidak ada lagi. Terutama terkait aset kita yang banyak tapi tidak menghasilkan PAD. Misalnya sawah atau tanah sebesar 100 hektar itu tidak jelas terhadap PAD nya.
- Sardiman : Terkait dengan Bidang Evaluasi Pendapatan, harapan kami kedepan bisa dilakukan evaluasi. Terkait aset anggota Banleg meminta di satukan pengelolaan asetnya sehingga pengawasan terhadap aset ada di satu tempat saja dan tidak lagi bertabur-tabur.
- Pimpinan : Apa yang kami sampaikan itu pengalaman kami yang selama ini terjadi, makanya kami minta biar ada perubahan kalau tidak kami pastikan sama seperti biasa.
- Justar. YS, S.Pd : Kalau Pendapatan masih di bidang kami rasa tidak akan meningkat pendapatan daerah kita.
- Kabag Organisasi : Kalau Bidang Pendapatan dikeluarkan dari Dinas Keuangan, di keuangan hanya mengelola keuangan, pelaporan dan akuntansi.

Tanzilurrahman : Kami ingin supaya pengelolaan pendapatan daerah itu jelas dan pada saat kami melakukan pengawasan itu jelas.

Pimpinan : Kita inginkan supaya kita menekan kebocoran PAD kita jangan sampai terulang lagi. Jadi bagaimana sikap kita apa kita panggil Dinas Keuangan.

Kabag Hukum Setdakab : Nanti akan kami panggilkan disaat pembahasan Qanun selanjutnya.